



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AL RAHMAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 761681

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.887.775.000

1. Tanah Seluas 472 m² di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI
Rp. 178.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 8.347 m²/8.347 m² di KAB / KOTA
MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 13.141 m²/13.141 m² di KAB / KOTA
MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 302.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.530 m²/2.530 m² di KAB / KOTA
MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 37.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 3.561 m²/64 m² di KAB / KOTA
MUNA BARAT, WARISAN Rp. 110.775.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m²/228 m² di KAB / KOTA
KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 787.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.083 m²/1.083 m² di KAB / KOTA
MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.957.500

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
3.942.500
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
128.250.000



3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 17.765.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	134.672.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.284.675
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.177.689.675
III. HUTANG	Rp.	354.488.479
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.823.201.196

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.